

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Secara etimologi “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan bukan makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Secara matematis persentase kemiskinan juga dirumuskan sebagai berikut:

$$PPM = \frac{JPM}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

PPM = Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional

JPM = Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional
pada waktu tertentu

JP = Jumlah penduduk pada waktu yang sama.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam ukuran kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lainnya seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum. Pada

umumnya terdapat indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Mengukur kemiskinan dengan mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif (Tambunan, 2001).

a. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut merupakan ketidakmampuan seseorang dengan pendapatan yang diperoleh untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup setiap hari. Kebutuhan minimum tersebut diterjemahkan dalam ukuran finansial (uang). Nilai minimum tersebut digunakan sebagai batas garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil, sehingga dapat ditelusuri kemajuan yang diperoleh dalam menanggulangi kemiskinan pada level absolut sepanjang waktu.

World Bank menggunakan ukuran kemiskinan absolut ini untuk menentukan jumlah penduduk miskin. Menurut *World Bank*, penduduk miskin adalah mereka yang hidup kurang US\$1 per hari dalam dolar PPP (*Purchasing Power Parity*). Akan tetapi, tidak semua negara mengikuti standar minimum yang digunakan *World Bank* tersebut, karena bagi negara-negara berkembang level tersebut masalah tinggi, oleh karena itu banyak negara menentukan garis kemiskinan nasional sendiri dimana kriteria yang digunakan disesuaikan dengan kondisi perekonomian masing-masing negara.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan kemiskinan absolut Indonesia merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum energi kalori (2.100 kilo per kapita per hari) yang digunakan tubuh dan kebutuhan dasar minimum untuk sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan dasar lain.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subyektif. Mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Kemiskinan relatif ini digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan.

2.1.1.1 Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Sharp, et al (1996) dalam Mudrajat Kuncoro (1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Penyebab timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana (2009:28-29) yaitu:

1. Pendidikan yang Terlampau Rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.
2. Malas Bekerja. Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.
3. Keterbatasan Sumber Daya Alam. Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.
4. Terbatasnya Lapangan Kerja. Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.
5. Keterbatasan Modal. Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

6. **Beban Keluarga.** Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

2.1.1.2 Ciri-Ciri Kemiskinan

Menurut (Hartomo dan Azis, 1997) mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan memiliki ciri, yaitu:

- a. Mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal maupun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki sendiri sedikit sekali sehingga kemampuan memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
- b. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan maupun modal usaha, sedangkan syarat tidak terpenuhi untuk memperoleh kredit perbankan seperti adanya jaminan kredit dan lain-lain, sehingga mereka yang perlu kredit terpaksa berpaling kepada “lintah darat” yang biasanya meminta syarat yang berat dan memungut biaya yang tinggi.
- c. Tingkat pendidikan mereka yang rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka habis tersisa untuk mencari nafkah sehingga tidak tersisa lagi untuk belajar. Anak-anak mereka tidak dapat menyelesaikan sekolah, karena harus membantu orang tua mencari tambahan tambahan penghasilan atau menjaga adik-adik di rumah, sehingga secara turun-temurun mereka terjat dalam keterbelakangan garis kemiskinan.

- d. Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. Banyak diantara mereka tidak memilih tanah, walaupun ada kecil sekali. Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar petani, karena pertanian bekerja dengan musiman maka kesinambungan kerja kurang terjamin. Banyak diantara mereka kemudian bekerja sebagai “pekerja bebas”, berusaha apa saja. Dalam keadaan penawaran tenaga kerja yang besar maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka di bawah garis kemiskinan, di dorong dengan kesulitan hidup di desa maka banyak diantara mereka mencoba berusaha di kota.
- e. Kebanyakan diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan, sedangkan kota di banyak negara sedang berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa. Apabila di negara-negara maju pertumbuhan industri menyertai urbanisasi pertumbuhan kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka urbanisasi di negara berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga dalam perkembangan industri. Bahkan, sebaliknya perkembangan teknologi di kota justru menarik pekerjaan lebih banyak tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota dalam kantong-kantong kemelaratan. Menurut (Todaro, 1997) masyarakat miskin mempunyai beberapa ciri sebagai berikut:
- 1) Perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan.
 - 2) Perbedaan sejarah, sebagai dijajah oleh negara yang berlainan.

- 3) Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya.
- 4) Perbedaan peranan sektor swasta dan negara.
- 5) Perbedaan struktur industri.
- 6) Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain.
- 7) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan.

2.1.1.3 Dampak Tingkat Kemiskinan

- a. Kriminalitas merupakan dampak lain dari kemiskinan. Kesulitan mencari nafkah mengakibatkan orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat tanpa memperdulikan halal atau haramnya uang sebagai alat ukur guna memenuhi kebutuhan. Misalnya saja perampokan, penodongan, pencurian, penipuan, pembegalan, penjambretan dan masih banyak lagi contoh kriminalitas yang bersumber dari kemiskinan. Mereka melakukan itu semua karena kondisi yang sulit mencari penghasilan untuk keberlangsungan hidup dan lupa akan nilai-nilai yang berhubungan dengan tuhan.
- b. Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan dampak kemiskinan. Misalnya biaya pendidikan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena tak lagi mampu membiayai sekolah. Putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah keterampilan, menjangkau cita-cita dan mimpi mereka. Ini menyebabkan kemiskinan yang dalam karena hilangnya kesempatan untuk

bersaing dengan global dan hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak.

- c. Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskinan. Jika anak-anak putus sekolah dan bekerja karena terpaksa akan ada gangguan pada anak-anak putus sekolah dan bekerja karena terpaksa, akan ada gangguan pada anak-anak itu sendiri seperti gangguan pada perkembangan mental, fisik dan cara berpikir mereka. Contohnya adalah anak-anak jalanan yang tak mempunyai tempat tinggal, tidur di jalan, tidak sekolah, mengamen untuk mencari makan dan lain sebagainya. Dampak kemiskinan pada generasi penerus mendapatkan hak mereka untuk bahagia, mendapatkan pendidikan, mendapat nutrisi baik dan lain sebagainya. Ini dapat menyebabkan mereka terjebak dalam kesulitan hingga dewasa dan berdampak pada generasi penerusnya.

2.1.1.4 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Kekeliruan paradigma dalam memahami kemiskinan tentu menyebabkan adanya analisis yang keliru, artinya seharusnya memunculkan variabel-variabel yang signifikan untuk menanggulangi kemiskinan justru variabel yang tidak signifikan dimasukkan, sehingga estimasi bias dan hasil yang diharapkan tidak terjadi. Mencermati beberapa kekeliruan paradigmatik penanggulangan kemiskinan, ada strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan (Huraerah, 2005):

- a. Karena kemiskinan bersifat multidimensional, maka program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi

memperhatikan dimensi lain. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan non ekonomi. Strategi pengentasan kemiskinan hendaknya diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, kemiskinan ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi. Selain itu, langkah pengentasan kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis.

- b. Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (*networking*), serta informasi pasar.
- c. Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan.
- d. Strategi pemberdayaan. Kelompok agrarian populism yang dipelopori kelompok pakar dan aktivis LSM, menegaskan, masyarakat miskin adalah kelompok yang mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah mau memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur dirinya.

2.1.1.5 Teori Tingkat Kemiskinan

Teori yang digunakan antara lain adalah Emil Salim (1992, dalam Togar Saragih, 2006:5-6) mengemukakan bahwa ciri-ciri orang miskin adalah:

- a. Umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal dan keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki kecil sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan terbatas.
- b. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha disamping itu tidak terpenuhi syarat untuk mendapatkan kredit perbangkan, menyebabkan mereka berpaling ke renternir.
- c. Tidak memiliki tanah. Jika adapun relatif kecil mereka umumnya menjadi buruh tani, atau pekerja kasar di luar pertanian. Pekerjaan pertanian bersifat musiman menyebabkan kesinambungan kerja kurang terjamin. Mereka umumnya sebagai pekerja bebas, akibatnya dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar tingkat upah menjadi rendah dan mendukung atau mempertahankan mereka untuk selalu hidup dalam kemiskinan.

Menurut Thorbecke, kemiskinan dapat lebih cepat tumbuh di perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan karena, pertama, krisis-krisis cenderung memberi pengaruh terbuk kepada beberapa sektor ekonomi utama di wilayah perkotaan. Kedua, penduduk pedesaan dapat memenuhi tingkat subsistensi dari produksi mereka sendiri. Hasil studi atas 100 desa yang dilakukan *SMERU Research Institute* memperlihatkan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan belum tentu dapat menanggulangi kemiskinan, namun perlu pertumbuhan yang berkelanjutan dan distribusi yang lebih merata serta kemudahan akses bagi rakyat miskin.

Tingkat pertumbuhan modal yang rendah merupakan hambatan utama pembangunan ekonomi. Pembentukan modal di negara-negara sedang berkembang

merupakan “*vicious cycle*” (lingkaran yang tidak berujung pangkal). Produktivitas yang sangat mengakibatkan rendahnya pendapatan riil. Pendapatan yang rendah mengakibatkan rendahnya pembentukan modal.

Menurut Nurkse dalam Togar Saragih (2006:7) ada dua lingkaran perangkap kemiskinan yaitu:

- a. Dari segi penawaran (*Supply*): tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah mengakibatkan kemampuan menabung masyarakat rendah. Kemampuan untuk menabung yang rendah menyebabkan tingkat pembentukan modal (investasi), yang kemudian akan menyebabkan tingkat pembentukan modal dan demikian tingkat produktivitasnya rendah.
- b. Dari segi permintaan (*Demand*): di negara-negara yang miskin perangsang untuk menanam modal sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat sangat rendah tersebut dikarenakan tingkat produktivitas yang rendah sebagai wujud dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu, disebabkan kekurangan perangsang untuk menanam modal dan seterusnya.

2.1.2 Tingkat Pengangguran

Sebelum membahas tingkat pengangguran terbuka, maka yang harus diketahui adalah pengangguran. Dimana salah satu aspek untuk mengukur kinerja suatu perekonomian adalah tingkat pengangguran. Pengangguran adalah masalah ketenagakerjaan yang dialami banyak Negara. begitu seriusnya masalah ini sehingga dalam setiap rencana pembangunan ekonomi masyarakat selalu dikatakan

dengan tujuan untuk menurunkan angka pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak atau belum mendapatkan pekerjaan. Artinya seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran terjadi akibat dari kurangnya permintaan tenaga kerja perekonomian jika dibandingkan dengan jumlah pekerja yang menawarkan tenaga kerjanya, pada tingkat upah dan harga yang sedang berlaku.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di negara sedang berkembang (NSB) menjadi semakin serius. Pengangguran disebabkan oleh hancurnya sistem sosial sebelum diganti seluruhnya oleh sistem lain. Pada saat yang sama, berkurangnya intensitas modal untuk industri modern menyebabkan berkurangnya kapasitas penerimaan tenaga kerja.

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.

1.1.2.1 Jenis-jenis Pengangguran

Dalam studi ekonomi makro lebih lanjut, pembahasan masalah pengangguran akan dilakukan lebih spesifik dan lebih cermat. Adapun jenis-jenis pengangguran berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

- a. Pengangguran friksional (*Frictional Unemployment*), yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
- b. Pengangguran struktural (*Structural Unemployment*), yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
- c. Pengangguran siklis atau pengangguran konjungtur (*Cyclical Unemployment*), yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.
- d. Pengangguran musiman (*Seasonal Unemployment*), yaitu pengangguran yang berkaitan dengan fluktuasi dengan kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian.

1.1.2.2 Bentuk-bentuk Pengangguran

Dilihat berdasarkan bentuk-bentuk pengangguran dibagi menjadi empat golongan, sebagai berikut:

- a. Pengangguran terbuka (*Open Unemployment*), adalah mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk mereka. Secara definisi pengangguran terbuka menurut Sukirno (2000) adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan 15 pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. Tingginya pengangguran terbuka mengindikasikan jika penduduk yang telah memasuki usia kerja namun belum

mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran kerja diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja.

Secara matematis tingkat pengangguran terbuka juga dirumuskan sebagai berikut:

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Keterangan

TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%)

PP = Jumlah penduduk (orang)

PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)

Pada umumnya menurut Kuncoro (2000) angka pengangguran terbuka pada daerah yang memiliki industri banyak maka angka pengangguran terbukanya akan cenderung tinggi. Hal ini disebabkan masyarakat yang baru saja menyelesaikan pekerjaan akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang mereka dapatkan ketika menempuh pendidikan. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika masyarakat tersebut mencari atau menunggu peluang untuk bekerja pada sektor industri yang mereka harapkan.

- b. Setengah pengangguran (*Under Unemployment*), adalah mereka yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti atas produksi secara keseluruhan.
- c. Tenaga kerja yang lemah (*Impaired*) adalah mereka yang mungkin bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
- d. Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.

1.1.2.3 Teori Pengangguran

a. Teori Keynesian

Teori Keynesian yang menyatakan bahwa pekerja semata-mata ditentukan oleh aspek perusahaan dengan tingkat upah masa lalu yang given. Artinya teori ini banyak melandasi pemikiran tenaga kerja Keynesian. Menurut teori excess supply and demand akan tetap ada, karena pengurangan pengangguran semata-mata ditentukan oleh kebutuhan perusahaan. Perusahaan akan memberikan tingkat upah sesuai dengan *Margin Revenue Product Of Labor* (MRPL) atau Produk Pendapatan Marginal Dari Tenaga Kerja (tingkat upah).

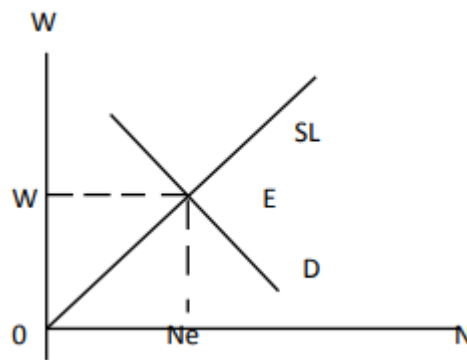
b. Teori Lewis

Teori Lewis yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Akan kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja di sektor lain. Dengan demikian menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerjaan tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaiknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk akumulasi pendapatan dengan asumsi bahwa perpindahan pekerjaan dari subsisten ke sektor kapitalis modern lancar dan perpindahan tersebut tidak akan berpindah menjadi “terlalu banyak”.

c. Teori Fei-Ranis

Dalam teori Fei-Ranis mengemukakan bahwa Negara berkembang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Dari kedua teori Lewis dan Fei-Ranis yang menyatakan bahwa teori pengangguran yang tertera pada teori ketenagakerjaan yang menyatakan, salah satu masalah yang muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja (*demand for labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supply for labor*), pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut lebih besar penawarannya dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (adanya *excess supply of labor*) dan lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya *excess demand for labor*).



Gambar 2.1

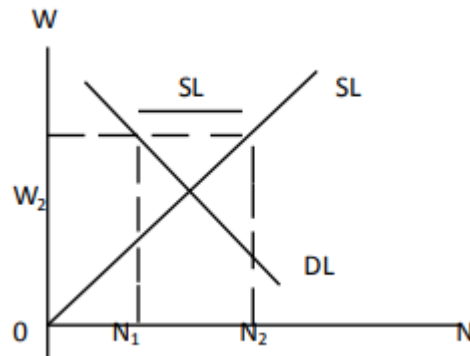
Keseimbangan Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Keterangan

- SL = Penawaran tenaga kerja
- DL = Permintaan tenaga kerja
- W = Upah riil
- N = Jumlah tenaga kerja

Pada gambar 2.1 menjelaskan, jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, yaitu masing-masing sebesar N_e pada tingkat upah keseimbangan W . Dengan demikian, Titik keseimbangan adalah titik E. Pada tingkat upah keseimbangan W , semua orang

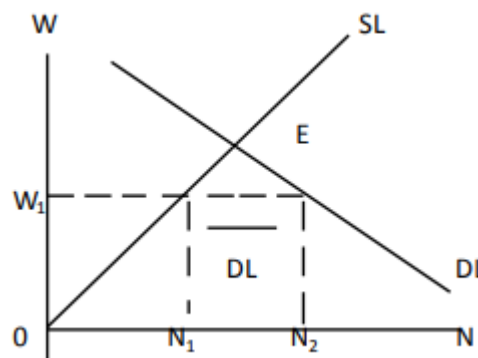
yang ingin bekerja telah dapat bekerja. Berarti tidak ada orang yang menganggur. Secara ideal keadaan ini disebut *full employment* pada tingkat upah W .



Gambar 2.2

Excess Supply of Labour

Pada gambar 2.2 menjelaskan, bahwa terlihat adanya ketidakseimbangan yaitu lebih besar penawarannya dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (*excess supply of labor*). Pada tingkat upah W_1 , Penawaran tenaga kerja (SL) lebih besar daripada permintaan tenaga kerja (DL). Jumlah orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebanyak N_2 , sedangkan yang diminta hanya N_1 . Dengan demikian, ada orang yang menganggur pada tingkat upah W_1 sebanyak $N_2 - N_1$.



Gambar 2.3 *Excess Demand of Labour*

Pada gambar 2.3 terlihat adanya ketidakseimbangan yaitu lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (*excess demand for labor*). Pada

tingkat upah W_2 , permintaan akan tenaga kerja (DL) lebih besar daripada penawaran tenaga kerja (SL). Jumlah orang yang menawarkan dirinya untuk bekerja pada tingkat upah W_1 adalah sebanyak N_1 , sedangkan yang diminta adalah sebanyak N_2 .

2.1.3 Rasio Ketergantungan

Menurut Mantra (2000), *dependency ratio* didefinisikan sebagai rasio antara kelompok penduduk umur 0-14 tahun yang termasuk dalam kelompok penduduk belum produktif secara ekonomis dan kelompok penduduk umur 65 tahun ke atas termasuk dalam kelompok penduduk yang tidak lagi produktif dengan kelompok penduduk umur 15-64 tahun termasuk dalam kelompok produktif.

Secara matematis rasio ketergantungan juga dirumuskan sebagai berikut:

$$RK = \frac{P_{(0-14)} + P_{65+}}{P_{(15-64)}} 100\%$$

Keterangan

RK = Rasio ketergantungan

$P_{(0-14)}$ = Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun)

P_{65+} = Jumlah penduduk usia tua (65 tahun ke atas)

$P_{(15-64)}$ = Jumlah penduduk usia produktif (14-64 tahun)

Semakin tinggi angka *dependency ratio* menggambarkan semakin berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif karena harus mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia non produktif sehingga pendapatan yang ada lebih banyak digunakan untuk konsumsi daripada menabung dan mengakibatkan penurunan dalam pembentukan modal dan akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

2.1.4.1 Teori Rasio Ketergantungan

Menurut Harrod-Domar, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan secara langsung atau secara positif berbanding lurus dengan rasio tabungan karena identitas dalam perhitungan pendapatan nasional adalah $S=I$ dengan S adalah tingkat tabungan dan I adalah tingkat investasi dan menurut Solow, jika suatu negara menyisihkan sebagian besar pendapatannya ke dalam tabungan dan investasi maka negara tersebut akan memiliki persediaan modal pada kondisi mapan dan tingkat pendapatan yang tinggi. Sedangkan jika suatu negara hanya menabung dan menginvestasikan sebagian kecil dari pendapatannya maka modal dalam kondisi mapan dan pendapatannya akan rendah. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rostow bahwa pembangunan akan mudah diciptakan hanya jika jumlah tabungan ditingkatkan. Tingkat tabungan yang tinggi akan mengakibatkan tingkat investasi yang tinggi pula sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh kenaikan pendapatan nasional (Mankiw, 2003).

2.1.4 Investasi

Menurut Sukirno (2000:69), investasi didefinisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Dengan kata lain dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara umum investasi meliputi penambahan barang dan jasa dalam masyarakat seperti

pertambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, lahan baru, perusahaan-perusahaan baru, dan sebagainya. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi.

Perbedaan Investasi langsung dan investasi tidak langsung yaitu:

1. Investasi langsung
 - a. Investasi dengan uang/perengkapan
 - b. Mendirikan perusahaan
 - c. Perusahaan dikendalikan sebagian atau keseluruhan pemilik perusahaan
 - d. Investasi tidak dapat ditarik setiap saat
 - e. Membutuhkan kehadiran secara fisik
 - f. Undang-undang penanaman modal
 - g. Pengelola BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
2. Investasi tidak Langsung
 - a. Investasi dengan membeli saham
 - b. Tidak perlu mendirikan perusahaan
 - c. Adanya pemisahan pemilik dan manajemen
 - d. Investasi dapat ditarik setiap saat
 - e. Tidak perlu hadir secara fisik
 - f. Undang-undang penanaman modal
 - g. Pengelola Bapepam dan LK

2.1.5.1 Faktor-Faktor Mempengaruhi Investasi

Kekuatan ekonomi utama menentukan investasi adalah hasil biaya investasi yang ditentukan oleh kebijakan tingkat bunga dan pajak, serta harapan mengenai masa depan. Faktor-faktor penentu investasi sangat tergantung pada situasi di masa depan yang sulit untuk diramalkan, maka investasi merupakan komponen yang paling mudah berubah. Penanaman modal dalam negeri memberikan peranan dalam pembangunan ekonomi dinegara-negara sedang berkembang. Hal ini terjadi dalam berbagai bentuk modal investasi mampu mengurangi kekurangan tabungan dan melalui pemasukan peralatan modal dan bahan mentah dengan demikian menaikkan laju pemasukan modal, selain itu tabungan dan investasi yang rendah mencerminkan kurangnya modal di negara keterbelakangan teknologi bersamaan dengan modal uang dan modal fisik, modal investasi yang membawa serta keterampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik-teknik produksi maju, pembawaan produk dan lain-lain. Selain itu juga melatih tenaga kerja setempat pada keahlian baru. Semua ini pada akhirnya akan mempercepat pembangunan ekonomi negara terbelakang pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang sangat mempengaruhi penanaman modal asing kedalam negeri.

Faktor –faktor yang mempengaruhi investasi adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh nilai tukar Secara teoritis dampak perubahan tingkat/nilai tukar dengan investasi bersifat uncertainty (tidak pasti) berpengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran, yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran domestik.

2. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Tingkat bunga mempunyai pengaruh yang signifikan pada dorongan untuk berinvestasi pengelolaan barang-barang dan bahan baku produksi memerlukan modal (input) lain untuk menghasilkan output/barang final.
3. Pengaruh Tingkat Inflasi Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi.
4. Pengaruh Infrastruktur Seperti dilakukan banyak negara di dunia, pemerintah mengundang investor guna berpartisipasi menambahkan modalnya di sektor-sektor infrastruktur. Seperti jalan tol, sumber energi listrik, sumber daya air, pelabuhan dan lain-lain. Partisipasi tersebut dapat berupa pembiayaan dalam mata uang rupiah atau uang asing.

2.1.5.2 Investasi Mampu Memberikan Keuntungan Secara Ekonomis

Menurut (Jhingan 2007, h. 335) Sebagian-sebagian dari kegiatan ekonomi, tujuan utama dilakukannya investasi adalah untuk mencari keuntungan yang oleh karena itu sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya para investor pada umumnya senantiasa mempertimbangkan aspek *economic opportunity* (peluang ekonomi) terlebih dahulu, sehingga dengan demikian akan dapat memprediksi keuntungan yang dapat diperoleh, adapun bentuk (*economic opportunity*) yang mungkin dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara pada dasarnya dapat berupa :

- a. Upah buruh yang rendah
- b. Pasar yang luas
- c. Dekat dengan sumber daya alam
- d. Tersedianya bahan baku
- e. Tersedianya lokasi untuk mendirikan pabrik
- f. Memperoleh insentif perpajakan pada umumnya insentif
- g. Adanya status tertentu yang dimiliki oleh negara tersebut.

2.1.5.3 Pengertian Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pengertian pembentukan modal langsung definisi modal langsung adalah (penanaman modal) hanya mencakup penanaman modal secara langsung, penanaman modal secara langsung ini dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan dengan mitra lokal dengan melakukan kerjasama operasi tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial (technical and management assistance) dengan memberikan lisensi (Johannes 2010, h. 13). PMTB merupakan investasi fisik yang menunjukkan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. PMTB bisa diklasifikasikan menurut jenis barang modal, sektor institusi, dan lapangan usaha/industri.

2.1.5.4 Arti Pembentukan Modal dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi

Arti pembentukan modal adalah masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktivitas produktivitas saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal, perkakas, alat-alat

mesin, fasilitas angkutan pabrik dan perlengkapan. Inti prosesnya adalah pengalihan sebagian sumber daya yang sekarang ada pada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan persediaan barang modal begitu rupa sehingga memungkinkan perluasan output yang dapat konsumsi pada masa depan. (Jhingan 2007, h. 337). Pembentukan Modal terdiri dari barang yang nampak seperti pabrik, alat-alat dan mesin, maupun barang yang tidak nampak seperti pendidikan bermutu tinggi serta kesehatan. Kuznets menyatakan bahwa pembentukan modal domestik tidak hanya mencakup biaya untuk konstruksi, peralatan, dan persediaan dalam negeri, tetapi juga pengeluaran lain. Kecuali pengeluaran yang diperlukan untuk mempertahankan output pada tingkat yang ada. Dalam mencakup pembiayaan untuk pendidikan. Rekreasi dan barang mewah yang memberikan kesejahteraan dan produktivitas lebih pada individu dan semua pengeluaran masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan moral penduduk yang bekerja. Jadi pembentukan modal meliputi modal material dan modal manusia (Jhingan 2007, h. 337).

2.1.5.5 Teori Investasi

John Maynard Keynes mendasarkan teori tentang permintaan investasi atas konsep efisien marjinal capital (Marginal Efficiency of capital atau MEC). Sebagai suatu definisi kerja, MEC dapat didefinisikan sebagai tingkat perolehan bersih yang diharapkan (Expected net rate of return) atau pengeluaran capital tambahan. Menurut Jhingan (2000) bahwa kunci pada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasikan menciptakan pendapatan, kedua investasi memperbesar kapasitas

produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Yang pertama dapat disebut dampak permintaan, dan yang kedua dampak penawaran investasi.

Investasi adalah usaha mencakup pembelian barang kapital saat ini atas dasar ekspektasi adanya penerimaan dimasa mendatang. Mengingat penerimaannya di masa mendatang, calon investor harus mengestimasi besarnya penerimaan untuk tahun ini, tahun depan, dan seterusnya sepanjang usia produktif dari investasi yang dilakukan.

Pada dasarnya investasi didefinisikan sebagai semua pengeluaran pada barang-barang kapital riil. Akan tetapi dalam bahasa sehari-hari investasi juga mencakup pembelian aktiva. Secara umum pengeluaran investasi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang ada saat ini untuk diperoleh penggunaan atau manfaatnya pada saat yang akan datang (Waluyo). Bila dilihat dari jenisnya, investasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu investasi riil dan investasi financial. Investasi riil yaitu investasi terhadap barang-barang tahan lama (barang-barang modal) yang akan digunakan dalam proses produksi. Jenis investasi riil ini masih terbagi lagi tiga komponen investasi: investasi tetap perusahaan (business fixed investment), investasi untuk perumahan (residential construction), investasi perubahan bersih persediaan perusahaan (net change in business investor).

Sedangkan investasi finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, dan surat bukti lainnya. Perkataan investasi merupakan salah satu istilah ekonomi yang selalu digunakan orang awam, teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai persen

pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Dengan perkataan lain dalam teori ekonomi investasi berarti kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi sesuatu perekonomian (Sadono Sukirno 2000).

Berdasarkan teori manajemen portofolio. Secara sederhana investasi dapat diartikan sebagai cara penanaman modal, yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan tertentu sebagai hasil penanaman modal tersebut. Dalam setiap keputusan investasi, sebagai seorang yang rasional. Perhatian investor akan diarahkan pada tingkat pengembalian ('rate of return) investasi. Ia akan memilih investasi yang menjanjikan tingkat keuntungan tertinggi. Karena investasi yang akan dilakukan mengandung unsur ketidakpastian, maka investor harus mempertimbangkan faktor resiko 'risk.

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contohnya membangun rel kereta api atau pabrik. Investasi adalah suatu komponen dari PDB artinya PDB adalah hasil dari penjumlahan konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah adalah selisih dari ekspor dan impor. Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik dan mesin) dan investasi residential (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga. Suatu pertumbuhan pada pendapatan akan mendorong investasi yang

lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 2010-2020. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Penulis	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di D.I. Yogyakarta 2010-2017 (Suripto, Lalu Subayil, 2020)	Dependen: 1. Kemiskinan Independen: 1. Pengangguran	Independen: 1. Rasio Ketergantungan 2. Investasi	Tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan sedangkan pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap	https://sti.emm.amuj.u.e-journal.id

2.	<p>Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Ketergantungan Terhadap Kemiskinan di kabupaten Sarolangun (Rohana, Junaidi, Purwaka Hari Prihanto, 2017)</p>	<p>Dependen: 1. Kemiskinan</p> <p>Independen: 1. Rasio Ketergantungan</p>	<p>Independen: 1. Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Investasi</p>	<p>Pertumbuhan penduduk berpengaruh tidak signifikan dan rasio ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sorolangun Secara simultan pertumbuhan penduduk berpengaruh dan rasio ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sarolangun</p>	<p>https://online-journal.unja.ac.id</p>
3.	<p>Analisis Pengaruh Tingkat Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio), Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Per Kapita, Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2020 (Samiaji Surya Mas Gumelar 2021)</p>	<p>Dependen: 1. Kemiskinan</p> <p>Independen: 1. Rasio Ketergantungan</p>	<p>Independen: 1. Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Investasi</p>	<p>Rasio ketergantungan dan tingkat pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan sedangkan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2020 Secara simultan rasio ketergantungan, IPM dan pendapatan per kapita berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan</p>	<p>http://eprints.uns.ac.id/</p>

				Provinsi Jawa Timur tahun 2000-2021	
4.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di 9 (sembilan) Kota di Provinsi Jawa Timur (Renta Yustie, 2020)	Dependen: 1. Kemiskinan Independen 1. Rasio Ketergantungan 2. Tingkat Pengangguran Terbuka	Independen: 1. Investasi	Indeks pembangunan manusia, rasio ketergantungan dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sembilan Kota di provinsi Jawa Timur Secara simultan indeks pembangunan manusia, rasio ketergantungan dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sembilan Kota di provinsi Jawa Timur	http://jurnalfebi.uinsby.ac.id
5.	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah minimum Regional, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur (Reggi Irfan Pambudi, Mohammad Saleh, Teguh Hadi Priyono, 2016)	Dependen: 1. Kemiskinan Independen: 1. Pengangguran	Independen: 1. Rasio Ketergantungan 2. Investasi	Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur Secara simultan pertumbuhan	http://repository.unej.ac.id

				ekonomi, upah minimum regional dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur	
6.	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan (Lailatul Istifaiyah, 2015)	<p>Dependen:</p> <p>1. Tingkat Kemiskinan</p> <p>Independen</p> <p>1. Pengangguran Terbuka</p>	<p>Independen:</p> <p>1. Rasio Ketergantungan</p> <p>2. Investasi</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan</p> <p>Secara simultan pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan</p>	<p>https://jimfeb.uib.ac.id</p>
7.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Hapsari Uju Utami, Siti Umajah Masjkuri, 2018)	<p>Dependen:</p> <p>1. Jumlah Penduduk Miskin</p> <p>Independen</p> <p>1. Tingkat Pengangguran Terbuka</p>	<p>Independen:</p> <p>1. Rasio Ketergantungan</p> <p>2. Investasi</p>	<p>Pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan sedangkan upah minimum regional, tingkat pengangguran terbuka dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin</p> <p>Secara simultan pertumbuhan</p>	<p>http://repository.unair.ac.id</p>

				penduduk, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin	
8.	Analisis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2013-2018 (Novia Nurmayanti, 2019)	Dependen: 1. Kemiskinan Independen : 1. Pengangguan	Independen: 1. Rasio Ketergantungan 2. Investasi	Indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan dan upah minimum kabupaten berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Secara Simultan indeks pembangunan manusia, upah minimum kabupaten, pengangguran dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat	http://epri.nts.uad.ac.id
9.	Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan	Dependen: 1. Tingkat Kemiskinan	Independen: 1. Tingkat Pengangguan	Investasi berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan	https://ejournal.unsr

	Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Gorontalo	Independen: 1. Investasi	ran Terbuka 2. Rasio Ketergantungan	pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintahan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gorontalo Secara simultan Investasi, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gorontalo	<i>at.ac.id/</i>
10.	Pengaruh Tingkat Pengangguran, Investasi, Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Banten	Dependen: 1. Kemiskinan Independen: 1. Investasi 2. Tingkat Pengangguran	Independen: 1. Rasio Ketergantungan	Investasi dan tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan sedangkan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Secara simultan tingkat pengangguran, investasi dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan	https://ejournal.um.ac.id

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Pengangguran terhadap Kemiskinan

Menurut Sadono Sukirno (2004:297), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

Besar jumlah pengangguran menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan yang ada di suatu wilayah tersebut. Karena pengangguran yang disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Masalah pengangguran bertambah serius yang disebabkan perkembangan penduduk yang kian bertambah cepat dan jumlah yang sangat besar. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang.

Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Dengan rendahnya pendapatan akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga naik dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga ikut turun. Dalam teori, selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan karena masyarakat yang menganggur tidak mempunyai penghasilan dan pengaruhnya adalah pasti miskin.

2.2.2 Hubungan Rasio Ketergantungan terhadap Kemiskinan

Menurut Arsyad (2010), Tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin cepat di negara-negara sedang berkembang menyebabkan proporsi penduduk yang belum dewasa menjadi bertambah tinggi dan jumlah anggota keluarga bertambah besar. Akibatnya angka beban tanggungan (*Burden of Dependency Ratio*), yaitu perbandingan antara orang-orang yang belum/tidak sanggup bekerja dengan orang-orang yang ada dalam batas umur turut serta dalam proses produksi.

Dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, secara tidak langsung dengan tingginya *dependency ratio* yang terjadi tidak diimbangi dengan persediaan lapangan pekerjaan maka akan berdampak pada kemiskinan disebabkan jumlah penduduk yang tinggi, jumlah angkatan kerja yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga beban ketergantungan yang meningkat dikarenakan adanya masalah terhadap pembangunan ekonomi yang menimbulkan *gap employment* dan jumlah kemiskinan.

Semakin tingginya rasio ketergantungan maka tingkat kemiskinan akan meningkat karena membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dan apabila rasio ketergantungan menurun maka kemiskinan akan ikut menurun karena jumlah tanggungan akan menurun.

2.2.3 Hubungan Investasi dengan Kemiskinan

Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja,

meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni; (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Peningkatan investasi dapat mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Peningkatan investasi juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat yang berada di dalam garis kemiskinan. Dengan demikian masyarakat yang berada di dalam garis kemiskinan tadi dapat meningkatkan gizi, pendidikan bagi anak-anak, dan dapat menabung untuk masa depan.

Semakin tingginya investasi maka tingkat kemiskinan akan menurun karena dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran dan apabila investasi menurun maka kemiskinan akan meningkat karena keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga pendapatan masyarakat menurun.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan hasil studi terdahulu tentang faktor-faktor kemiskinan, maka dalam kajian penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial tingkat pengangguran dan rasio ketergantungan berpengaruh positif sedangkan investasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Bogor tahun 2010-2020?

2. Diduga secara bersama-sama tingkat pengangguran, rasio ketergantungan dan investasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bogor tahun 2010-2020?

